

budaya (strategi mobilisasi dilakukan melalui penyebaran di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan budaya maka kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, wasan/pertubuhan masyarakat dan berbagai lembaga/pertubuhan lainnya, melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara bottom-up. Kader

Grand strategi politik dakwah PKS ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam pelbagai bidang kehidupan yang bertumpu pada kader dengan pelbagai disiplin ilmu dan profesi, dengan kekuatan integritas moral dan kualiti-profesional. PKS sebagai partai dakwah berupaya memperkasakan kader dalam pelbagai disiplin untuk berkembang dan berfungsi mendukung dan memperkuat gerakan budaya dan struktural transformasi bangsa.

Jika hal ini dilakukan, ia akan melahirkan keperibadian yang Islamik. Keperibadian

sar awam agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, maka ada paling sedikit tiga tahapan dalam strategi mobilitas vertikal, iaitu: Pertama, penyebaran kader dakwah ke organisasi/lembaga di berbagai sektor kehidupan menuju pusat kekuatan dan dasar. Kedua, kinerja kader dakwah dalam pertubuhan/lembaga tersebut, berperanan dalam mempengaruhi, merumuskan menterjemahkan dan menerapkan dasar awam agar sesuai dengan manhaj Islam.

Di dalam negara terdapat tiga jenis per-

dukungan PKS. Kata kuncinya, PKS itu partai kader, partai yang solid, yang diyakini mesin politiknya berjalan, dan kader di bawahnya itu sangat taat pada kebijakan di atasnya. Itu yang sebenarnya menakutkan. Jadi langkah politik PKS itu efektif. Persoalannya, bagaimana kemudian Prabowo maupun Jokowi bisa meyakinkan PKS sehingga PKS bisa mendukung mereka? Kita lihat saja nanti.

Penulis adalah Ketua Prodi Ilmu Politik, Fisip USU.

# Pilkada Langsung; Disintegrasi Bangsa

Oleh Dr H. Erwan Efendi, S.Sos, MA

**Pilkada melalui DPRD memberikan kita berdiri teguh dalam identitas bangsa kita sesuai cita-cita *founding father* bahwa demokrasi kita bukan ala Barat melainkan demokrasi perwakilan sesuai sila ke-4 Pancasila**

**B**anyak para pakar politik baik akademisi, politisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) begitu juga institusi pemerintah meminta pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dievaluasi ulang dan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Cukup banyak alasan yang diungkapkan para pihak. Alasan yang disampaikan dinilai sangat logis dan realistis jika dilihat secara empiris. Alasan skandunya adalah Pilkada langsung selama ini berpotensi besar terhadap kemungkinan terciptanya konflik yang bermuara "disinterasi bangsa".

Ancaman seperti yang disebutkan di atas secara tidak langsung diakui pemerintah. Bahkan Mendagri Tjahjoe Kumolo dan DPR RI membuka wacana mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung (Waspada, 11/4/2018). Evaluasi itu direncanakan dilaksanakan bersamaan revisi UU Pilkada sesuai Pilkada serentak. Salah satu wacana yang mengkrystal, yaitu mengembalikan Pilkada ke DPRD dengan sejumlah perbaikan. Langkah itu dilakukan tentu setelah mencermati kenyataan di lapangan antara lain banyaknya kepala daerah terjerat korupsi yang ditengarai akibat mahalannya biaya Pilkada yang harus ditanggung oleh kandidat.

Mahfud MD setuju wacana itu. "Saya sangat setuju itu, saya mantan hakim MK. Ini banyak banget *mudharat* Pilkada langsung," tegas Mahfud di salah satu surat kabar harian di Medan (10/4/2018). Mahfud menegaskan, sistem Pilkada langsung muncul akibat suasana politik Indonesia yang kurang kondusif. Ada hal yang membuat Pilkada ketika itu tidak lagi melalui DPRD. Berdasarkan catatan, hingga kini sekira 90 kepala daerah dijerat KPK karena terlibat korupsi. Dari sejumlah kepala daerah tersebut, terdapat lima kepala daerah yang diketahui bertarung dalam Pilkada serentak 2018.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian juga berharap ada kajian akademik mengevaluasi

kembali sistem Pilkada langsung karena terbukti menuai banyak dampak negatif selain aspek positif (Waspada, 2/4/2018). "Kita paham Pilkada langsung diusulkan saat era reformasi, tujuannya masyarakat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Tetapi setelah 20 tahun kita juga lihat ada dampak negatif dari Pilkada langsung ini," kata Tito.

Melalui Pilkada langsung ruang demokrasi serta hak untuk dipilih dan memilih terbuka lebar. Namun tidak dapat dibantah bahwa Pilkada secara langsung juga telah menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak akan terbelah mengikuti pilihan politik masing-masing. Itu artinya Pilkada langsung sudah membelah masyarakat dan setiap pembelahan jika tidak dikontrol akan menimbulkan konflik yang dikhawatirkan akan mengancam integritas bangsa.

Ada beberapa catatan bahwa kekurangan Pilkada langsung: Biaya yang dikeluarkan sangat besar, mulai dari biaya penyelebaran, kampanye, lobi partai pendukung. Ini memungkinkan calon kepala daerah yang bermodal besarlah yang akan menang. Kedaulatan milik pemodal dan asing. Sudah barang tentu kepala daerah yang menang Pilkada yang telah diberi modal yang banyak terikat kepada pemilik modal. Kepala daerah yang berhutang biaya kampanye dan kebutuhan kemenangannya akan mengembalikannya melalui proses tender yang berkali-kali lipat keuntungannya bagi penyokong modal.

## Korupsi

Untuk mengembalikan modal besar pribadi, sponsor maupun partai yang telah mengeluarkan miliaran rupiah sudah barang tentu menjadikan korupsi sebagai jalan yang nyaman. Korupsi menjadi lumrah bagi para kepala daerah, hanya masalah bagaimana mereka bermain saja—bisa bermain bersih dan aman ataupun tidak. Bila bermain kotor akan tertangkap KPK, jika-lau bermain bersih sukses tidak ketahuan

dan berjalan melenggang. Rawan penyalahgunaan birokrasi dan minim pengawasan. Selama ini kita lemah dalam pengawasan dan *punishment*. Banyak penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam proses Pilkada.

Jika pemilihan kepala daerah dilakukan di DPRD maka kelebihanannya; efisiensi anggaran. Penghematan anggaran secara menyeluruh dengan dana penghematan yang besar. Mulai dari anggaran negara yang terpakai untuk penyelenggaraan pemilihan, biaya pribadi calon kepala daerah, biaya kampanye dan uang *sponsorship*.

Sudah sama kita ketahui, proses pemilihan umum mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan bupati melahirkan konflik dari proses kampanye bahkan hingga pasca dilantiknya pemenang. Proses pemilihan kepala daerah yang banyak sekali dilakukan Indonesia menjadikan konflik yang terus-menerus hanya pindah wilayah saja. Dengan Pilkada melalui DPRD kita akan lebih kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dalam Pilpres saja masyarakat mengalami momentum rawan konflik. Memiliki demokrasi dengan identitas khas bangsa Indonesia. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga masih dalam bingkai demokrasi.

Pada prinsipnya, pemilihan langsung maupun melalui DPRD masih merupakan proses demokrasi. Pilkada melalui DPRD memberikan kita berdiri teguh dalam identitas bangsa kita sesuai cita-cita *founding father* bangsa kita bahwa demokrasi kita bukanlah demokrasi ala Barat melainkan demokrasi perwakilan yang sesuai dengan sila ke-4 dari dasar negara kita, Pancasila. Kepala daerah dan DPRD lebih bersinergi. Kepala daerah dan DPRD sudah dipastikan lebih bersinergi karena kepala daerah merupakan produk tidak langsung dari DPRD. Program pengembangan daerah akan lebih lancar karena tidak perlu adanya konflik antara kepala daerah dengan DPRD.

Program pembangunan daerah dan pengembangannya juga akan lebih berkesinambungan. Meniadakan politikus yang kutu loncat, bahkan memungkinkan memilih kepala daerah dari kalangan profesional murni. Dengan proses pemilihan melalui DPRD dapat meminimalisir politikus kutu loncat yang pragmatis dan oportunis yang dalam pemilihan langsung marak dengan pemodal besar sebagai penyokongnya. Kutu loncat akan mendapat stigma negatif sehingga tidak ada partai yang ber-

minat. Para pemodal juga tidak dapat menjadikan kepala daerah sebagai boneka.

## Penutup

Harus dipahami bahwa proses pemilihan kepala daerah baik langsung maupun tidak langsung adalah sama-sama merupakan proses demokrasi. Bangsa kita memang terlalu beranekaragam sehingga kita perlu merumuskan demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa. Karena itu kita harus memilih sistem pemilihan kepala daerah yang sesuai budaya bangsa yang majemuk, melihat mana lebih banyak manfaat dan mudharatnya. Filosofi Pancasila sebagai dasar negara kita sudah menegaskan menutamakan musyawarah mufakat bukan dengan suara terbanyak yang disebut dengan demokrasi. Semoga.

Penulis adalah Wartawan Waspada.

## Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan 'Redaktur Opini Waspada' dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

## SUDUT BATUAH

- \* Kapoldasu baru mengetahui LP over kapasitas  
- *Duh pak, kok bisa kecolongan?*
- \* Pengamat: Politik uang bahayakan Indonesia  
- *Terutama berdampak pada besarnya biaya politik*
- \* Keyboard Bongkar marak di Deliserdang  
- *Jadi teringat awak sama keyboard 'Mak Lampir', he...he...he*

Wat Deel

Semin 30/4/2018